

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM Fekon*, Vol 3, Hal 1178–1189.
- Asfiryati, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *JOM Fekon*, Vol 4, Hal 1986–1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2021
- Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.*
- BKPSDM Kabupaten Ponorogo 2021
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 18(2), Hal 140–152.
- Djalil, M., Nadirsyah, & Fatmi, L. (2017). *Influence Of Implementation Of Government Accounting Standard And The Effectiveness Of Government's Internal Control System On The Quality Of Local Financial Report And Its Impact Toward The Accountability Of Regional Financial Management (A Research On Government Agencies of Aceh Province, Indonesia)*. *Research Journal Of Finance and Accounting*, Vol 8(4). Hal 106-114.
- Fajri, R. N. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Ekonomi Paradigma*, Vol 2(1), Hal 1–15.
- Firdaus, P. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar ). *JOM Fekon*, Vol 3(1), Hal 1994–2007.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 5(4), Hal 77–86.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah

- Daerah Kabupaten Pematang Jaya). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol 2(1), Hal 21-42
- Herlina, R., Taufeni, T., & Azwir, N. (2020). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business, and Accounting*, Vol 4(2), Hal 419-433
- Houston, B. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 2 Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jatimnow.com. (27 Juni 2020). *Keren, Ponorogo Kembali Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut*. Diakses pada tanggal 28 September 2020, dari <https://jatimnow.com/baca-27596-keren-ponorogo-kembali-raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Monica, T. D. (2017). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah, SIKD Dan Kualitas SDM Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai. *JOM Fekon*, Vol 4(1), Hal 556–570.
- Mudjiyono. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol 3(1), Hal 22–30.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurlaili. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah studi empiris pada SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, Vol 3(1), Hal 449-461.
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS
- Ponorogo.go.id. (25 Februari 2020). Ingin ASN Paham tentang SAKIP Bupati Ipong Mengadirkan Petinggi dari Kemenpan-RB. Diakses pada tanggal 2 November 2020, dari <https://ponorogo.go.id/2020/02/25/ingin-asn-paham-tentang-sakip-bupati-ipong-menghadirkan-petinggi-kemenpan-rb/>
- ppid.ponorogo.go.id. (26 Juni 2020). *Opini BPK Tahun 2019-PPID Kabupaten*

- Ponorogo. Diakses pada tanggal 26 September 2020, dari <https://ppid.ponorogo.go.id/opini-bpk-tahun-2019/>
- Putra, D. P. (2018). Pengaruh Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol 7(2), 82–196.
- Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Wonogiri). *Skripsi UIN Surakarta*. Diakses pada 26 September 2020
- Radarmadiun.co.id. (24 Januari 2020). *Kekayaan Pemkab Ponorogo Semakin Banyak*. Diakses pada tanggal 24 September 2020, dari <https://radarmadiun.co.id/kekayaan-pemkab-ponorogo-semakin-banyak/>
- Rozi, M., Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Keterampilan, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 6(1), Hal 51–60
- Sabriani, A. A. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol 5(2), Hal 14–23.
- Santoso, S. 2015. *Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data*. Umpo: Press.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekom*, Vol 4(1), Hal 843–857.
- Setyanto, E., & Hamzah, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 9(1), Hal 89-105.
- Sudiarianti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Mandiri*, Vol 4(71), Hal 1–25.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Ekonomi Paradigma*, Vol 19(02), Hal 61–67
- Suryaningsih, L. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kota Medan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, Vol 3(1)
- Suwardjono. 2015. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPF: Yogyakarta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 13 Tahun 20013 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan
- Warisno. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. *JOM Fekon*, Vol 3(1), Hal 2429–2443.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol 7(1), Hal 61-78

